

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ade Irawan, Danang Widoyoko, Febri Hendri, 2014, *Modul Citizen Report Cards*, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1999, "*Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*", Aditya Media, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, "*Pemberantasan Korupsi*", Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 1991, "*Perkembangan Hukum Pidana Khusus*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Arya Maheka, 2006, "*Mengenal Dan Memberantas Korupsi*", Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, "*Tindak Pidana Khusus*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2000, "*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang*", Badan Penerbit Undip.
- Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*", 2008, 'Kencana Prenada Media Group', Jakarta.
- Bryan A Garner, 1999, "*Black's Law Dictionary, Seventh Edition*", St. Paul: West Group
- Evi Hartanti, 2005, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta.

- H.M. Daud Ali dan Habibah Daud, 1999, '*Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hanitijo Soemitro dan Ronny, 1988, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia indonesia, Jakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, "*Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Media Aksara Prima, Jakarta.
- Husen Alting At.All, 2010, "*Hukum Pidana Korupsi Dalam Teori Dan Praktik*", Semarak Tata Warna, Jakarta.
- Ilham Gunawan, 1990, "*Postur Korupsi Di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, Dan Politis*", Angkasa, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*", Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Johnny Ibrahim, 2007, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatof*", Bayumedia Publishing, Malang.
- Leden Marpaung, 2004, "*Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan Dan Pencegahan*", Djambatan, Jakarta.
- Lili Rasjidi at.all, 2009, "*Kapita Selekta Hukum tinjauan kritis atas situasi dan kondisi hukum di indonesia, seiring perkembangan masyarakat nasional dan internasional*" Widya Padjadjaran.
- Made Pirdata, 1990, '*Perencanaan Pendidikan Partisipasi Dengan Pendekatan System*', Jakarta.

- Mahmud Mulyadi, 2009, "*Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*", USU Press, Medan.
- Mahrus Ali, 2012, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, "*Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*", Badan Penerbit Undip Semarang Cet. Ii.
- P.A.F. Lamintang, 2000, "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti, Cetakan Keempat, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006 "*Penelitian Hukum*", Kencana, Jakarta.
- Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Bary, 2006, '*Kamus Ilmiah Populer*', Arloka, Surabaya.
- Prasetyo at.all, 2003, "*Ombudsman Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih*", PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 2004, "*Sekitar Masalah Korupsi,Aspek Nasional dan Aspek Internasional*", Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, "*Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*", Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, "*Penelitian Hukum Normatif*", CV.Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Ui Press, Jakarta.
- Suandi Hamid Dan Sayuti, 1999, "*Menyingkap Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme Di Indonesia*"Aditya Media, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, '*Kamus Hukum*', PT. Rineka cipta, Jakarta.
- Sudarsono, 1992 "*Kamus Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Alumni.

Syafari Imam As'ari, 1993, '*Sosiologi Kota dan Desa*', Usaha Nasional, Surabaya.

Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, 2011, "*Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Victor M. Situmorang, 1990, "*Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*". Rineka Cipta, Jakarta.

Y.Slamet, 1994, '*Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*' Sebelas Maret Unirsity Press, Surakarta.

Zainal Arifin, "*Puluhan Warga Desak Kejati Jateng Tahan Mantan Bendahara Persipa Pati*", Tribun Jateng.Com, 16 Desember 2015

Zainuddin Ali, 2009, '*Metode Penelitian Hukum*', Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

Setiajeng Kadarsih, "*Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010

Setiajeng Kadarsih, "*Tugas Dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Uu No. 37 Tahun 2008*", Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jawa Tengah

Ridwan, 2009, "*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*", Jurnal Jure Humano, Volume 1 No.1

I Ketut Setiawan, “*Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Program Kekhususan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Ade Fajar Rezki, 2017, “*Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam*”, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

INTERNET

Sangkoeno, “*Peran Serta Dalam Pemberantasan Korupsi Di Inonesia*”,
[Www.Sangkoeno.Com/2012/10/Peran-Serta-Dalam-Pemberantasan-Korupsi.Html?M=1](http://www.sangkoeno.com/2012/10/Peran-Serta-Dalam-Pemberantasan-Korupsi.html?M=1), Tgl 29-12-2016

<http://agussiswoyo.com/hukum-islam/instrumen-anti-korupsi-di-indonesia/>
 diakses pada tanggal 19-03-2018.

<http://koranborgol.com/article/148576/mahasiswa-pati-desak-penanganan-dana-apbd-koni-pssi.html>, tanggal 20 Mei 2017

<https://antikorupsi.org/id/content/siapa-icw>, diakses pada tanggal 23 oktober 2018

https://www.kompasiana.com/rivel/membangun-partisipasi-masyarakat-dalam-memerangi-korupsi_552988646ea8348068552d76 di akses 1 November 2018

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 (b).

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 1

Undang-undang No. 43 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peran Serta Masyarakat

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 13 Ayat 3

Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2000, Lembaga Informasi Nasional Republik Indonesia.

WAWANCARA

Yogi Wahyu Nur Ikhsan, “*Wawancara Pribadi*” Anggota Aliansi Mahasiswa Pati, 29 Oktober 2018, Pati

Nailal Afif, “*Wawancara Pribadi*”, Koordinator Aliansi Mahasiswa Pati, tanggal 24 Oktober 2018, Pati

Jumadi, “*Wawancara Pribadi*”, Koordinator Aksi Forum Masyarakat anti Korupsi-Formasi- Pati, 03 November 2018, Pati

Jumadi, “*Wawancara Pribadi*”, Masyarakat Srikaton Pati, 10 November 2018, Pati